

2025

Minggu ke-1 November
(3 s.d. 9 November 2025)

Isu Sepekan

Bidang Kesra, Komisi IX



BADAN KEAHLIAN
DPR RI

*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

REFLEKSI HKN 2025 DI TENGAH LONJAKAN KASUS PENYAKIT

Tri Rini Puji Lestari

Analis Legislatif Ahli Madya
tri.lestari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menjelang momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN) pada 12 November 2025, sejumlah daerah di Indonesia melaporkan lonjakan kasus penyakit dalam sepekan terakhir. Beberapa media daerah dan nasional menyoroti peningkatan kasus influenza, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), *influenza like illness* (ILI), leptospirosis, serta demam berdarah dengue (DBD) di berbagai wilayah. Di Bengkulu Tengah, jumlah kasus ISPA meningkat hingga dua kali lipat dalam tujuh hari terakhir, dipicu oleh suhu panas ekstrem yang melemahkan daya tahan tubuh masyarakat. Kondisi serupa juga terjadi di Karawang, Jawa Barat, di mana ISPA menjadi penyakit dengan jumlah kasus tertinggi selama periode pancaroba. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, kasus influenza dan leptospirosis dilaporkan meningkat seiring datangnya musim hujan. Situasi ini menjadi alarm bagi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman penyakit musiman yang berulang.

Di tingkat nasional, laporan Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa kasus DBD hingga akhir Oktober 2025 telah mencapai 131.000 kasus dengan 545 kematian. Bahkan, data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkapkan bahwa realisasi klaim perawatan pasien DBD empat kali lebih tinggi dibandingkan data pelaporan rutin pemerintah, mengindikasikan adanya ketidaksesuaian data kasus yang sangat signifikan. Hal ini menjadi sorotan penting karena akurasi data kesehatan merupakan fondasi untuk menyusun kebijakan dan respons kesehatan publik yang tepat. Perbedaan data ini juga menggambarkan bahwa sistem kewaspadaan dini (surveilans) kesehatan nasional masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mampu memberikan deteksi serta peringatan dini secara efektif.

Kondisi cuaca ekstrem turut menjadi pemicu meningkatnya penyakit. Sebagaimana diberitakan Detik Health, hal ini menjadi faktor yang melemahkan sistem imun masyarakat sehingga rentan terserang influenza dan ISPA. Selain itu, lingkungan yang lembap dan perubahan suhu ekstrem menjadi kondisi ideal bagi penyebaran virus serta bakteri penyebab penyakit. Situasi ini memperlihatkan bahwa perubahan iklim dan dinamika cuaca memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan memerlukan kesiapsiagaan sistem kesehatan yang lebih adaptif.

Beban fasilitas kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri. RSUD Sidikalang di Sumatera Utara terpaksa menambah fasilitas tempat tidur karena membludaknya pasien ISPA dan ILI dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas layanan kesehatan, baik rumah sakit maupun Puskesmas, masih didominasi peran kuratif sehingga ketika terjadi lonjakan kasus, sistem pelayanan kesehatan dengan cepat menjadi penuh dan kewalahan. Layanan kesehatan primer seharusnya menjadi benteng awal untuk pencegahan dan deteksi penyakit, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan optimal. Kegiatan promotif preventif yang seharusnya diperkuat di tingkat Puskesmas dan kader kesehatan perlu mendapat perhatian lebih serius.

Momentum HKN 2025 menjadi waktu yang tepat untuk merefleksikan apakah fondasi sistem kesehatan Indonesia sudah cukup kuat dalam menghadapi ancaman penyakit berulang. Lonjakan kasus penyakit musiman yang terjadi hampir setiap pancaroba menunjukkan perlunya penguatan layanan kesehatan primer dan surveilans. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjadikan peringatan HKN bukan hanya sebagai seremoni, tetapi sebagai refleksi tahunan terhadap kinerja sektor kesehatan dan evaluasi kelemahan yang masih terjadi.

Penguatan fondasi sistem kesehatan harus dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas, peningkatan kapasitas Puskesmas, optimalisasi surveilans dan digitalisasi data kesehatan, serta memperkuat edukasi publik agar masyarakat memiliki kesadaran pencegahan. Upaya promotif preventif perlu terus ditingkatkan, termasuk melalui kolaborasi lintas sektor seperti sekolah, dunia usaha, media, dan komunitas lokal. Hanya dengan sistem kesehatan yang adaptif, responsif, dan berbasis pencegahan, Indonesia dapat menghadapi lonjakan penyakit musiman secara lebih tangguh ke depan.

Atensi DPR

Langkah konkret yang perlu diambil oleh Komisi IX DPR RI dalam memperkuat layanan kesehatan primer dan sistem kewaspadaan dini penyakit meliputi:

- Mengawali peningkatan kapasitas Puskesmas sebagai garda terdepan melalui pemenuhan tenaga kesehatan, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta penguatan edukasi promotif preventif kepada masyarakat, termasuk memastikan pemerataan layanan di wilayah terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3T).
- Mendorong penyusunan atau penyempurnaan regulasi yang mengatur standar pelaporan kasus, integrasi data kesehatan lintas sektor, dan tata kelola sistem peringatan dini agar deteksi dan respons terhadap lonjakan penyakit lebih cepat, akurat, dan efektif.
- Mengarahkan alokasi anggaran kesehatan lebih berorientasi pada layanan dasar dan pencegahan, tidak hanya kuratif, guna memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi lonjakan penyakit berulang dan kejadian luar biasa.
- Menginisiasi kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, fasilitas kesehatan, sekolah, dunia usaha, media, dan komunitas untuk meningkatkan literasi kesehatan dan partisipasi publik dalam pencegahan penyakit secara berkelanjutan.

Sumber

cakaplah.com, 2 November 2025;
detik.com, 8 November 2025;
disway.id, 3 November 2025;
mistar.id, 5 November 2025;

radarkarawang.id, 3 November 2025;
rr.co.id, 3 November 2025;
suara.com, 8 November 2025.



EDITOR

LAYOUTER

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making